



Diplomasi Komersial Indonesia terhadap Australia dalam *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)* pada Era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019)

Alvira Rizki Wulandari

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Padjadjaran, Indonesia;

alvira17001@mail.unpad.ac.id

Dadan Suryadipura

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Padjadjaran, Indonesia; ,

dadan.suryadipura@unpad.ac.id

| submit: 21-07-2021 | Accept: 25-07-2021 | publish: 10-08-2021 |

Keywords

Commercial Diplomacy, IA-CEPA, Indonesia-Australia Cooperation.

ABSTRACT

Economic diplomacy that become one of focus in Joko Widodo Presidential Era has pushed this administration to build capacity among their diplomats to be country's sales person. Trade agreement negotiation also become one of focus during Joko Widodo Presidential era. Indonesia is pushed to increase their economy relation with countries in their traditional and non-traditional market. Australia is one of country in Indonesia's traditional market. As Indonesia's neighbour, Australia has a big impact on trade advantage that these both countries possible to gain. This ambition was putted on IA-CEPA, a comprehensive economic bilateral agreement. With Joko Widodo's focus on increasing economic diplomacy practice, along with business group part in IA-BPG, this study aims to explore business group's role to help government succeed IA-CEPA negotiation that will be seen through commercial diplomacy perspective using Reuvers and Ruel Conversion framework.

Kata Kunci

Diplomasi Komersial, IA-CEPA, Kerja Sama Indonesia-Australia.

ABSTRAK

Diplomasi Ekonomi yang menjadi salah satu fokus dari Pemerintahan Joko Widodo telah mendorong Indonesia untuk meningkatkan kapasitas seluruh diplomatnya agar dapat menjadi *sales person* negara. Selain itu, negosiasi perjanjian perdagangan pun menjadi salah satu fokus pemerintahan Joko Widodo. Indonesia pun didorong untuk meningkatkan hubungan ekonominya baik di pasar tradisional maupun non tradisional. Hubungan dengan salah satu negara pasar tradisional Indonesia, yaitu Australia yang juga merupakan salah satu negara tetangga Indonesia memiliki pengaruh cukup besar terhadap kemungkinan keuntungan yang dapat didapatkan oleh Indonesia melalui perjanjian perdagangan. Ambisi ini tertuang dalam perjanjian IA-CEPA yang proses negosiasinya telah dilakukan selama 12 putaran dalam kurun waktu 10 tahun. Dengan fokus Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan praktik diplomasi ekonominya, beserta adanya peranan kelompok bisnis yang tergabung dalam IA-BPG. Penelitian ini bertujuan untuk menggalikan peranan kelompok bisnis dalam membantu pemerintah Indonesia menyelesaikan negosiasi IA-CEPA yang akan dilihat dalam perspektif diplomasi komersial menurut kerangka konversi Reuvers dan Ruel.

PENDAHULUAN

Semenjak perjuangan kemerdekaannya, Indonesia telah menggunakan diplomasi sebagai instrumen politik luar negerinya. Pada awal kemerdekaan, diplomasi menjadi salah satu instrumen utama untuk mencapai pengakuan negara lain mengenai kedaulatan Indonesia. Kini, pada masa era pemerintahan Joko Widodo, selaras dengan kecenderungan interdependensi pada tatanan global beserta tantangan geopolitik dan geoekonomi yang muncul, Indonesia memutuskan untuk memfokuskan praktik diplomasinya pada diplomasi ekonomi dan diplomasi maritim. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015, pp.4-5)

Komitmen Indonesia dalam mengedepankan praktik diplomasi ekonomi juga tertuang dalam salah satu dari 8 sasaran strategis Kementerian Luar Negeri Indonesia tahun 2015-2019. Dengan adanya sasaran strategis ini, Indonesia berharap untuk dapat menunjukkan keunggulannya dalam praktik diplomasi ekonomi dibandingkan negara-negara lain. (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019)

Untuk menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan praktik diplomasi ekonomi, pada 29 Oktober 2014, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menjelaskan mengenai 4 pilar diplomasi ekonomi. Empat pilar tersebut diantaranya adalah meningkatkan dan memperluas akses pasar untuk produk-produk Indonesia melalui perubahan *mindset* para Diplomat Indonesia¹, meningkatkan kapasitas serta sumber daya para perwakilan Republik Indonesia yang berada di pasar non-tradisional, mendorong dan meningkatkan investasi asing khususnya pada sektor prioritas negara, dan memanfaatkan ASEAN Economic Community (AEC). (Sabaruddin, 2016, p.70) Selain itu, pengikatan kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata atau sering disebut sebagai TTI (*Trade, Tourism, Investment*) menjadi aspek yang penting dari diplomasi ekonomi Indonesia

untuk meningkatkan ekspor, wisatawan mancanegara dan investasi asing.

Pemerintah Indonesia juga menetapkan prioritas diplomasi ekonomi yang ditekankan kepada para Diplomat Indonesia, diantaranya adalah diplomasi komersial dan perdagangan. Kedua praktik diplomasi ini dapat membantu Indonesia dalam meningkatkan ekspor komoditas non-migas. Fokus tersebut dapat dilihat pada RPJMN 2015-2019. Dalam RPJMN tersebut disebutkan bahwa objektif dari pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia adalah hasil dari nilai ekspornya. (Sabaruddin, 2016, p. 80)

Dengan diplomasi komersial dan perdagangan yang menjadi salah satu fokus dari kebijakan luar negeri Indonesia, penguatan hubungan ekonomi baik dalam pasar tradisional maupun non tradisional semakin menjadi prioritas dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan aktivitas diplomasi ini. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penguatan hubungan ekonomi Indonesia dengan salah satu negara yang berada di *cluster* pasar tradisionalnya, yaitu Australia. Secara geografis, posisi Indonesia dan Australia yang sangat dekat akan memberikan keuntungan bagi kedua negara apabila mereka mempererat hubungan ekonominya. Bahkan pada *Australian Defense White Paper 2016*, Australia mengakui hal ini yang mana mereka menyatakan bahwa Indonesia yang diprediksi sebagai kekuatan ekonomi baru di ASEAN akan menjadi peluang terbesar Australia dalam memperkuat hubungan ekonomi di negara tersebut.

Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia dan Australia semakin menunjukkan komitmennya untuk mempererat hubungan ekonominya diantaranya adalah melalui Joint Declaration of the Leaders ASEAN-Australia and New Zealand Commemorative Summit pada tahun 2004 yang mana menjadi awal mula dari dibentuknya ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade

¹ Perubahan *mindset* yang dimaksud adalah para Diplomat Indonesia dituntut untuk berperan lebih

aktif dalam melakukan praktik diplomasi ekonomi (Sabaruddin, 2016, p.70)

Agreement (AANZFTA) pada tahun 2009. AANZFTA menjadi batu loncatan bagi Indonesia dan Australia untuk meningkatkan perdagangan dan investasinya.

Tidak hanya mempererat hubungan ekonomi dengan Australia melalui dibentuknya perundingan perjanjian multilateral saja, pada era Pemerintahan Presiden SBY pun Indonesia dan Australia berhasil membentuk IA-CEPA Pre-Agreement Facility yang digunakan sebagai bantuan sumber dana kedua negara dalam keberlangsungan negosiasi IA-CEPA dan dalam era pemerintahan ini juga berhasil diselesaikan 2 putaran perundingan IA-CEPA (perundingan pertama pada tahun 2012 dan kedua pada tahun 2013), sebelum akhirnya perundingan tersebut harus terhenti karena adanya ketegangan atau dinamika politik yang terjadi antara Indonesia dan Australia sejak November 2013 hingga Februari 2016.² (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2018)

Pada Maret 2016, era pemerintahan suksesor Presiden SBY, yaitu Presiden Joko Widodo, perundingan IA-CEPA kembali dibuka oleh menteri perdagangan kedua negara setelah sebelumnya pada tahun 2015 Perdana Menteri Malcolm Turnbull bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Indonesia untuk membicarakan keberlanjutan IA-CEPA. Dengan diplomasi ekonomi sebagai fokus praktik diplomasi di era pemerintahannya, dalam rentang 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia dan Australia berhasil melakukan 10 putaran perundingan. Perundingan terakhir terjadi pada bulan Juli 2018, hingga akhirnya pada bulan Agustus 2018 kedua negara dapat melakukan finalisasi penyelesaian perundingan di tingkat ketua kelompok perunding dan di akhir bulan yang sama penanda tangan dari deklarasi

penyelesaian IA-CEPA dilakukan oleh Menteri Perdagangan Indonesia dan Australia yang disaksikan oleh Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Scott Morrison. Pada November tahun 2019, Australia meratifikasi IA-CEPA, sedangkan Indonesia baru meratifikasinya pada Februari tahun 2020 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2018)

Untuk lebih memahami mengenai fenomena yang akan diangkat dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan mengenai beberapa studi terdahulu mengenai praktik diplomasi ekonomi yang dilaksanakan oleh Indonesia dan studi terdahulu mengenai IA-CEPA. Kluster dalam penelitian mengenai praktik diplomasi ekonomi Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu tantangan dan kesempatan dari praktik diplomasi ekonomi Indonesia (Killian (2012), Haryono (2019), & Margiansyah (2020)) dan strategi dari praktik diplomasi ekonomi Presiden Joko Widodo (Delanova (2017), Baidawi & Zarkasi (2019)). Untuk penelitian mengenai IA-CEPA, peneliti berhasil mengelompokkannya kepada 4 kluster, diantaranya adalah Strategi proses negosiasi IA-CEPA (Sholihah (2019), & Assyauri (2019)), Potensi dampak dari implementasi maupun implikasi IA-CEPA bagi kedua negara (Andriani & Andre (2017), Toledo (2017), Rahayu (2018), Ramandisyah (2018), Niami, Sulistiyono, Pujiono & Harahap (2019)), Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi IA-CEPA (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2016), Abduh (2018), Wilson (2018), Amalia, Ampere & Risagarniwa (2019), Chrismonita (2019), Mashuroh (2020)) dan Tantangan dan kesempatan dari pembentukan IA-CEPA (Susanto (2018) & Sidabutar (2020)).

² Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia sempat terhambat pada saat pergantian kepemimpinan Presiden SBY menuju Presiden Jokowi karena perbedaan gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi dan Anthony John Abbott. Namun, ketegangan karena

perbedaan gaya kepemimpinan tersebut tidak berlangsung lama, setelah terpilihnya Malcolm Turnbull sebagai Perdana Menteri Australia, hubungan kedua negara ini membaik dan membuka kembali negosiasi IA-CEPA. (Fitriani, 2018, pp. 41-49)

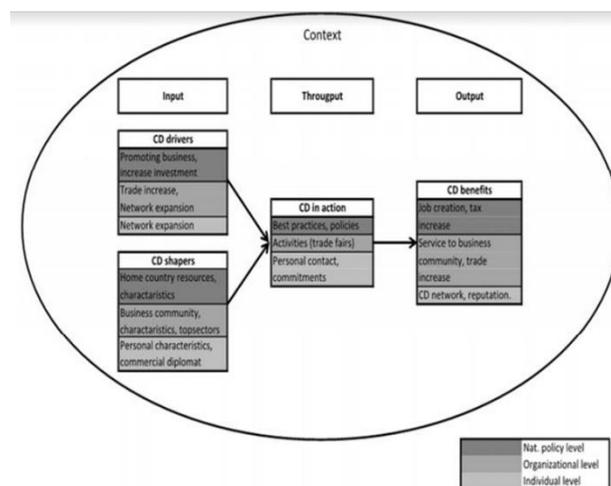
Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan banyak sekali perspektif baik dari sisi praktik diplomasi yang dijalankan oleh Indonesia hingga dampak, proses dan faktor pendorong Indonesia dan Australia untuk menyelesaikan IA-CEPA. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut tidak memberikan kerangka sistematis yang dapat dijadikan contoh oleh Indonesia dalam menjalankan dan menyukseskan negosiasi CEPA yang kini tengah difokuskan oleh pemerintah Indonesia. Masalah juga muncul karena penelitian-penelitian tersebut belum ada yang mengangkat permasalahan di tingkat kelompok bisnis yang mempengaruhi perdagangan Indonesia dan Australia padahal keunikan IA-CEPA berasal dari komitmen pemerintah kedua negara dalam mewadahi perspektif dari kelompok bisnisnya. Permasalahan ini telah mendorong dibutuhkan analisis secara sistematis untuk memahami secara lebih terstruktur mengenai bagaimana Pemerintah Indonesia dapat mendorong aktivitas komersial dengan menggunakan diplomasi selama proses pembentukan IA-CEPA. Selain itu, IA-CEPA juga memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan kerangka proses untuk menghasilkan CEPA yang dapat memberikan keuntungan yang signifikan untuk Indonesia dengan melihat cakupan yang cukup luas dari perjanjian ini. Maka dari itu, penelitian ini mengusung judul “Diplomasi Komersial Indonesia terhadap Australia dalam *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)* pada Era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019)” yang diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan tersebut.

KERANGKA KONSEPTUAL

Diplomasi komersial menurut Reuvers dan Ruel adalah penggunaan diplomasi sebagai bantuan terhadap peningkatan aktivitas komersial, yang meliputi kegiatan ekspor dan promosi FDI. Aktivitas tersebut bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, kesejahteraan negara asal dan peningkatan

keuntungan kompetitif negara. Untuk kerangka analisis mengenai diplomasi komersial yang dicetuskan oleh Reuvers dan Ruel berbentuk kerangka konversi dari diplomasi komersial seperti yang tertera pada gambar 1 berikut.

Gambar 1. Kerangka Konversi Diplomasi Komersial Reuvers dan Ruel



Sumber: Reuvers & Ruel, 2012:6

Bagian-bagian dari kerangka konversi tersebut diantaranya adalah

1. Input: Bagian ini terdiri dari 2 bagian, yaitu *drivers* dan *shapers*. *Drivers* merupakan penggerak atau pendorong yang merasionalisasi aktivitas diplomasi komersial. Oleh karena Reuvers menjelaskan kerangkanya dengan analisis dari 3 aktor, negara, kelompok bisnis dan individu, contoh *drivers* pada tingkat negara dapat berupa strategi untuk meningkatkan pendapatan pajak dan FDI, mempromosikan bisnis dan memperbanyak lapangan kerja, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, dalam level organisasi, tujuan dari *drivers* dapat berupa pengurangan resiko untuk memasuki pasar asing. Dalam level individu, Reuvers menyebutkan *drivers* pada level ini dapat berupa pembentukan reputasi dan *personal network*. (Reuvers & Ruel, 2012, pp. 11-12). Pada pembentuk atau *shapers*, karakteristik dari sumber daya

yang dimiliki oleh negara asal atau pengirim dan karakteristik dari diplomat komersial akan menjadi faktor yang diteliti. (Reuvers & Ruel, 2012, pp. 12-14)

2. Throughput/Commercial Diplomacy in Action: Bagian ini merupakan aktivitas-aktivitas diplomasi komersial yang dilakukan oleh diplomat komersial. Aktivitas ini terbentuk berdasarkan bagian input yang telah dijelaskan sebelumnya. (Reuvers & Ruel, 2012, pp. 14-15) Aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan oleh seorang diplomat komersial dapat dilihat pada gambar 2 berikut.

Gambar 2. Kerangka Konversi Diplomasi Komersial Reuvers dan Ruel

Network activities	Intelligence	Image campaigns	Support business
Developing business and government contacts	Gathering/Disseminating commercial information	Promoting goods and services	In negotiations; contract implementation and problem-solving
State visits/delegation	Market research	Participating in trade fairs, introducing potential exporters	Gathering export marketing data
Buyer-seller meetings	Reporting to home country	Sensitizing potential foreign investors	Supervision of violations of IPRs and contracts
Match-making	Consultant to both countries	Gathering export marketing data	Advocacy activities
Search for partners/distributors/investors/ lawyers	Image studies, joint scientific research	Tourism promotion activities	Coordination of legal actions
Personal network of commercial diplomat		Awareness campaigns	

Sumber: Reuvers & Ruel, 2012:8

3. Output: Bagian ini merupakan bagian dari keuntungan yang didapatkan oleh sebuah negara dari aktivitas diplomasi yang mereka lakukan. Keuntungan ini dibagi menjadi dua, yaitu keuntungan politik dan keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi dalam garis besarnya adalah segala keuntungan yang meliputi kesejahteraan dan peningkatan dalam perdagangan internasional. Keuntungan ekonomi ini dibutuhkan dalam praktik diplomasi komersial

karena dalam diplomasi jenis ini, kelompok-kelompok bisnis yang terlibat tentunya memiliki tujuan yang beragam dan berbeda. Keuntungan ekonomi akan menjadi hal yang menyatukan tujuan-tujuan tersebut. Untuk keuntungan politik, Reuvers menunjukkan beberapa kemungkinan keuntungan politik dari diplomasi komersial yang dicetuskan oleh penstudi lain, seperti menurut Kotabe dan Czinkota keuntungan politik yang dapat muncul dari praktik diplomasi komersial adalah meluasnya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan pajak dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. (Reuvers & Ruel, 2012, pp. 16-17)

4. Konteks: Konteks merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi praktik diplomasi komersial. Konteks dapat berupa faktor pendorong, karakteristik dari hubungan negara tujuan dan negara asal, dan juga fenomena global juga (Reuvers & Ruel, 2012, pp. 17-18)

METODE RISET

Metode yang akan digunakan dalam riset ini adalah metode kualitatif yang dicetuskan oleh Lamont (2015). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Untuk data primer, peneliti menyajikannya melalui hasil dari wawancara³ dengan *key informant* yang merupakan aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembentukan IA-CEPA sedangkan sumber data sekunder yang akan digunakan oleh peneliti adalah dokumen atau arsip terkait proses pembentukan IA-CEPA. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam riset ini adalah melalui wawancara, *internet-based research* dan riset dokumen dan arsip. Untuk jenis wawancara, penelitian ini melakukan wawancara semi-struktural⁴ dengan *key informant* yang telah

³ Pengumpulan data dari hasil wawancara dapat memberikan sumber data faktual yang dapat membantu peneliti dalam mendapatkan beragam perspektif dari target responden terhadap

fenomena atau isu yang akan dibahas oleh peneliti. (Lamont, 2015)

ditargetkan. *Internet based research* melalui website resmi baik dari pemerintah Australia maupun pemerintah Indonesia juga akan dilakukan untuk memperkaya data penelitian mengenai diplomasi komersial dalam proses negosiasi IA-CEPA ini.

Analisis data yang dilakukan adalah diskursus analisis yang mana data mengenai IA-CEPA yang telah didapatkan baik melalui wawancara, *internet-based research* dan dokumen akan dianalisis maknanya. Lalu, untuk Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara *cross reference* data dari beberapa sumber untuk memastikan bahwa hasil penelitian bersifat objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Joint Declaration on Comprehensive Partnership pada tahun 2005 merupakan *turning point* dari menguatnya komitmen atas hubungan Indonesia dan Australia. Cakupan dari deklarasi kerjasama komprehensif ini diantaranya adalah bidang keamanan, ekonomi dan teknis, serta *people to people links*. Deklarasi ini menjadi dasar dari beberapa perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Australia, salah satunya adalah IA-CEPA yang merupakan hasil dari komitmen kerjasama komprehensif di bidang ekonomi.

IA-CEPA dapat dikatakan sebagai sebuah perjanjian yang unik karena perjanjian ini merupakan perjanjian pertama bagi Indonesia yang menginstitutionalisasi kepentingan kelompok bisnis. Insitutionalisasi kepentingan kelompok bisnis ini dilakukan melalui pembentukan IABPG. IA-BPG sendiri beranggotakan Kadin, IABC, APINDO sebagai perwakilan kelompok bisnis Indonesia dan AIBC, AI Group dan Australian Chamber of Commerce and Industry (ACCI) sebagai perwakilan kelompok bisnis Australia. Cakupan kerja dari IA-BPG diantaranya adalah sebagai wadah untuk menampung aspirasi dari kelompok bisnis di setiap komoditas dan membawanya ke dalam pertemuan yang dilaksanakan secara reguler oleh anggota IA-BPG. Dalam setiap pertemuan, baik dari

kelompok bisnis Indonesia dan Australia menyampaikan hasil riset dan konsolidasinya dari asosiasi kelompok bisnis di masing-masing negara. Setelah itu, seluruh anggota IA-BPG akan membentuk laporan berupa yang disebut sebagai *IA-BPG Report Submission* yang hasilnya akan diberikan kepada tim negosiator IA-CEPA. Laporan dari IA-BPG yang berisi pandangan kelompok bisnis mengenai IA-CEPA dan bagaimana IA-CEPA dapat lebih menguntungkan bagi kedua negara melalui *engagement government to business (G2B)* maupun Business to Business (B2B). (IA-BPG, 2012, p. 19)

Peranan IABPG juga cukup penting karena pada saat dibukanya kembali negosiasi IA-CEPA, pemerintah kedua negara langsung memanggil perwakilan IABPG untuk memberikan perspektifnya terhadap perjanjian ini di perundingan keempat atau perundingan kedua sejak dibukanya kembali negosiasi IA-CEPA.

Total kedua negara telah melakukan 12 putaran negosiasi yang mana kelompok negosiator berasal dari beberapa kementerian dari dua negara. Kepala negosiator merupakan kementerian perdagangan masing-masing negara yang mana kementerian ini akan menjabatani kepentingan setiap kementerian agar negosiasi berjalan lancar. Hasil akhir dari cakupan IA-CEPA sendiri berupa cakupan mengenai perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi, dan paket skill yang mana analisisnya akan dilakukan pada sub judul selanjutnya.

Pembahasan

Faktor Pembentuk Tujuan Diplomasi Komersial Indonesia terhadap Australia dalam IA-CEPA

Dalam analisis ini, peneliti melihat ada 4 hal yang mempengaruhi terbentuknya tujuan dari diplomasi komersial Indonesia terhadap Australia dalam negosiasi IA-CEPA, diantaranya adalah perkembangan kapasitas ekspor dan impor Indonesia selama *Joint*

feasibility study dan periode pertama Jokowi, persepsi kelompok bisnis terhadap pasar satu sama lain, karakteristik diplomat komersial sebagai *sales person* negara, dan kurang kondusifnya iklim investasi Indonesia bagi investor Australia. Penjelasan dari tiap-tiap faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan Kapasitas Ekspor Dan Impor Indonesia Selama *Joint Feasibility Study* Dan Periode Pertama Jokowi

Saat negosiasi IA-CEPA dibuka kembali dan selama negosiasi dilaksanakan pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo tren pertumbuhan nilai ekspor tertinggi Indonesia untuk kelompok nonmigas berada pada komoditas besi dan baja (+54,6%), bubur kayu (11,9%), produk *seafood* (+9,7%), makanan olahan (+8,7%), dan *furniture* (+8,4%). Sedangkan untuk komoditas utama ekspor Indonesia adalah udang, kopi, minyak kelapa sawit, karet dan produk karet, TPT, alas kaki, elektronik, komponen kendaraan bermotor, dan *furniture*. Sedangkan untuk ekspor produk jasa, diantaranya adalah ahli teknologi informasi, tenaga kerja terampil di bidang pariwisata, dan juga para pekerja desain. (PPEI Kementerian Perdagangan Indonesia, n.d.)

Untuk hubungan ekspor dengan Australia produk jasa menjadi ekspor khususnya ekspor jasa ini di sektor pariwisata. Sedangkan, untuk ekspor barang Indonesia kepada Australia diantaranya adalah bahan bakar, *mineral oils* beserta produk distalasinya, kayu dan *articles of wood*, arang kayu, alat-alat mesin listrik dan suku cadangnya, mutiara, perhiasan imitasi, aksesoris dan baju, plastik dan bijih plastik, kertas, karet dan bijik karet, dan juga pupuk.

Dari sisi impor komoditas utama diantaranya adalah bahan bakar mineral dan distalasinya, hewan hidup, daging dan olahan daging, sereal, aluminium, bahan kimia anorganik, besi dan baja, dan gula.

Berbeda dengan ekspor Indonesia terhadap Australia yang didominasi oleh ekspor jasa, untuk impor Indonesia lebih banyak mengimpor barang dibandingkan jasa dari Australia

2. Persepsi Kelompok Bisnis terhadap Pasar Satu Sama Lain

Kelompok bisnis kedua negara sama-sama tidak mempercayai potensi dari kapabilitas pasar Indonesia maupun Australia. Di sisi kelompok bisnis Indonesia, mereka cenderung tidak melihat Australia sebagai pasar yang dapat menguntungkan karena adanya asumsi bahwa pasar Australia tidak cukup besar bagi kelompok bisnis Indonesia dan ketentuan dari kualitas barang yang terlalu tinggi. (Bahar, Peranan IABPG dan Pemerintah Indonesia dalam Menyuksesan Negosiasi IA-CEPA, 2021)

Hal yang sama juga dialami oleh kelompok bisnis dari Australia. Menurut hasil survey yang sempat dikeluarkan oleh ACCI, persepsi dari kelompok bisnis Australia membuat mereka enggan untuk memasukan produknya ke Indonesia. Persepsi-persepsi tersebut diantaranya adalah *barriers to ownership*, *political instability* dan korupsi. Selain 3 hal utama tersebut, birokrasi pemerintah Indonesia yang sulit, praktik bisnis yang tidak adil karena adanya korupsi, dan lemahnya penegakan hukum juga menjadi asumsi yang membuat kelompok bisnis di Australia tidak mau untuk memasuki market Indonesia. (Groeger, 2021)

Permasalahan-permasalahan lain dari kelompok bisnis juga tertuang dalam *position paper* yang dibentuk oleh IA-BPG yang mana masalah-masalah kelompok bisnis, diantaranya adalah mengenai *market failure* yang sering terjadi karena kurangnya informasi mengenai pasar (IA-BPG, 2012), kebutuhan kedua negara akan suntikan FDI dari investor, (IA-BPG, 2012, p. 6) infrastruktur dan logistik yang

menjadi pengahambat pergerakan barang (IA-BPG, 2012, pp. 6-7) dan diperlukannya kebijakan yang dapat melindungi *small medium enterprise*. (IA-BPG, 2012, p. 8)

3. Kurang Kondusifnya Iklim Investasi Indonesia Bagi Investor Australia.

Walaupun menurut pemerintah Indonesia dengan melihat perkembangan ekonomi dan politik Indonesia, kini iklim investasi Indonesia sudah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi menurut investor Australia hal ini belum lah cukup. Persepsi investor Australia mengenai kurang kondusifnya iklim investasi Indonesia, diantaranya adalah karena kompleksitas dan kurang konsistennya pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan yang cenderung berubah disetiap periodenya, (IA-BPG (2016), Pasaribu, Murwani & Setiawan (2021)) dan penerapan Daftar Negatif Investasi/DNI terhadap investor Australia juga belum sebanding dengan yang diterapkan kepada investor-investor dari ASEAN. (IA-BPG, 2016, p. 34)

Peneliti melihat bahwa persepsi dari para investor Australia terhadap pemerintah Indonesia juga sejalan dengan survey yang dilakukan oleh ACCI. Dengan melihat potensi dalam menaikan FDI dari Australia dan persepsi para investor, komitmen pemerintah Indonesia untuk membuat negaranya memiliki iklim investasi yang lebih baik khususnya melalui IA-CEPA harus dilakukan.

4. Karakteristik Diplomat Komersial Sebagai *Sales Person* Negara,

Diplomat komersial Indonesia yang dicantumkan dalam penelitian ini, peneliti kelompokan menjadi dua, yaitu negosiator di IA-CEPA dan juga perwakilan-perwakilan Indonesia di ITPC maupun IIPC, Sydney. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama salah satu negosiator Indonesia dari Direktorat

Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, dapat dilihat bahwa untuk diplomat komersial Indonesia yang diutamakan adalah memiliki latar belakang yang telah terbiasa untuk bernegosiasi ataupun berinteraksi secara langsung dengan negara-negara dari partner Indonesia. Beberapa pelatihan internal juga dilakukan oleh internal Kemendag dalam membangun kapasitas diplomat komersial Indonesia, seperti mengenai model-model ekonomi. (Zakharia, 2021)

Dari wawancara ini juga peneliti melihat bahwa diplomat komersial Indonesia dalam konteks IA-CEPA memang bertugas untuk menengahi baik kementerian lain yang ikut serta dalam negosiasi maupun kepentingan kelompok bisnis itu sendiri, sehingga peneliti tidak dapat menganalisis lebih dalam mengenai tujuan personal dari diplomat komersial Indonesia yang seharusnya dibahas di subjudul selanjutnya.⁵

Tujuan Diplomasi Komersial Indonesia terhadap Australia dalam IA-CEPA

Faktor-faktor yang mendorong pembentukan tujuan yang telah dijelaskan pada sub-judul sebelumnya telah membentuk tujuan diplomasi komersial Indonesia terhadap Australia, yang mana peneliti mengkategorikannya sebagai berikut:

1. Peningkatan Nilai Kompetitif Produk Indonesia di Pasar Australia

Kedua negara yang secara geografis memiliki keuntungan yang sangat besar ini cenderung memiliki kinerja perdagangan bilateral yang cukup buruk. Hal ini dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan negara di Asia lainnya yang dapat memasuki 10 tujuan ekspor utama Australia, Indonesia

⁵ Reuvers menjelaskan bahwa diplomat komersial berasal dari perwakilan negara yang mana berdasarkan penjelasan tersebut dalam penelitian

ini peneliti mengkategorikan negosiator dari Kementerian Perdagangan Indonesia beserta ITPC maupun IIPC di Australia sebagai diplomat komersial Indonesia.

yang cenderung lebih dekat dengan Australia hanya menduduki peringkat ke-15 sebagai tujuan eksportnya. Sedangkan untuk Indonesia, Australia menduduki peringkat ke-14 sebagai negara tujuan ekspor Indonesia. (Marthini, 2021)

Dibandingkan negara-negara tetangganya, banyak komoditas Indonesia yang tidak dapat bersaing dipasar Australia, contohnya adalah manufaktur dan komoditas produk olahan makanan dan minuman. Kurang kompetitifnya produk Indonesia ini disebabkan oleh perbedaan tarif yang dimiliki oleh negara lain, seperti Malaysia dan Thailand, pada pasar Australia dan permasalahan kelompok bisnis yang telah dijelaskan pada subjudul sebelumnya.

Kondisi tersebut telah menunjukkan bahwa AANZFTA memang memberikan dampak positif bagi hubungan ekonomi Australia dan Indonesia, khususnya dalam konteks aturan regional mengenai *rules of origin* yang akan berdampak kepada *supply chains* antara ASEAN, Australia dan New Zealand dan AANZFTA juga akan memberikan integrasi ekonomi yang lebih mendalam bagi regional tempat kedua negara ini berada. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam konteks bilateral, AANZFTA memiliki limitasi dalam mewujudkan kepentingan nasional Indonesia khususnya dalam menguasai pasar Australia karena kurang maksimalnya penerapan tarif di beberapa komoditas utama Indonesia.

2. Peningkatan *Foreign Direct Investment* melalui IA-CEPA

Selain memiliki tujuan untuk meningkatkan hubungan dagang dengan meningkatkan nilai kompetitif komoditas Indonesia di Australia, Pemerintah Indonesia juga memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan FDI dari Australia melalui perjanjian IA-CEPA. Beberapa sektor yang akan mengalami

peningkatan iklim investasi diantaranya adalah sektor layanan, seperti pendidikan, pelatihan kejuruan, pendidikan tinggi, pariwisata, konstruksi, pertambangan, rumah sakit, energi, pengelolaan air limbah, transportasi, layanan professional, dan lainnya. Tujuan Indonesia tersebut sejalan dengan klaim DFAT yang setuju dengan minat tersebut dan melihat IA-CEPA sebagai komitmen terkuat dari Pemerintah Indonesia mengenai investasi asing. (Patunru, Surianta, & Audrine, 2021, p. 16)

Pada *Fact Sheet IA-CEPA* yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Indonesia juga disebutkan bahwa Indonesia memiliki tujuan dalam segi investasi melalui keterlibatannya dalam negosiasi IA-CEPA ini, dengan FDI Australia yang mencapai USD 513 juta pada tahun 2017, Indonesia ingin menciptakan iklim investasi yang baik dan mudah melalui IA-CEPA guna menarik investor Australia. (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2018, pp. 4-8)

3. Komitmen dalam Membentuk *Economic Power House* di Asia Pasifik

IA-CEPA juga disebut sebagai bentuk perjanjian kerjasama modern karena pendekatan yang dilakukan tidak terbatas hanya dalam liberalisasi pasar dan pemenuhan permintaan pasar saja, tetapi juga dilihat dari aspek kesamaan budaya, nilai, dan masyarakatnya. Persamaan nilai tersebut akan membantu kedua negara dalam menentukan cakupan-cakupan kerjasama lainnya yang lebih mendalam. (Marthini, 2021)

Bahkan Direktur Jenderal PPI, Kemendag menyebutkan bahwa tarif bukanlah menjadi hal utama dalam visi jangka Panjang IA-CEPA, tetapi program kerjasama ekonomi yang lebih komprehensif dan mendalam adalah tujuan utama dari perjanjian ini. Asumsi yang

melihat bahwa komoditas ekspor dan impor Indonesia dan Australia yang cenderung sama, yaitu di bidang sumber daya alam telah membuka potensi bagi kedua negara bahwa dengan konsep *economic power house* kemungkinan Indonesia dan Australia memasuki *global value chain* akan lebih besar dibandingkan negara ini berdiri sendiri tanpa satu sama lain.

Dengan kata lain, tujuan diplomasi komersial Indonesia terhadap Australia tidak hanya terbatas pada potensi untuk menguasai pasar Australia saja, tetapi juga menggunakan perjanjian dari kerjasama ini untuk menciptakan kekuatan ekonomi baru guna memasuki *global value chain*. Tujuan ini juga tertera pada *factsheet* yang dipublikasikan oleh Kementerian Perdagangan mengenai IA-CEPA.

4. Kelompok Bisnis sebagai Pendorong Peningkatan Perdagangan dan Investasi Indonesia dan Australia

Dari sisi kelompok bisnis faktor *drivers* dapat terlihat pada *Report Position Paper* IA-BPG tahun 2012. Kelompok bisnis Indonesia maupun Australia setuju untuk pemerintah kedua negara membentuk FTA selain AANZFTA. (IA-BPG, 2012, p. 6) Pada saat dibukanya kembali negosiasi IA-CEPA tujuan kelompok bisnis pun masih sama, yaitu pengurangan tarif di beberapa komoditas. Selain pengurangan tarif dan kebijakan investasi, dalam laporan IA-BPG di tahun 2016, baik dari kelompok bisnis Indonesia dan Australia menyebutkan beberapa hambatan yang masih ada baik dari Indonesia maupun dari Australia, diantaranya adalah lambatnya pengurangan tarif di beberapa produk agrikultur, manufaktur, dan tekstil; prosedur dan regulasi perdagangan; pedoman yang kurang jelas mengenai persyaratan untuk barang-barang ekspor untuk memasuki pasar Australia; prosedur dari masuknya barang Indonesia ke Australia untuk lebih mudah, khususnya mengenai hambatan

yang bersifat teknis (seperti *sanitary and phytosanitary standard* dan kualifikasi di setiap sektor barang). (IA-BPG, 2016, pp. 25-34)

Aktivitas Diplomasi Komersial Indonesia terhadap Australia di Era Pemerintahan Joko Widodo (2014 - 2019)

Dari pembentuk dan juga tujuan yang telah ditetapkan, tahap selanjutnya menurut Reuvers adalah dengan menganalisis aktivitas-aktivitas diplomasi komersial yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara tujuannya untuk mendapatkan output yang diinginkan. Dalam analisis mengenai aktivitas diplomasi komersial yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Australia, peneliti mencoba menganalisis segala aktivitas diplomasi komersial yang dilakukan selama masa negosiasi IA-CEPA dilaksanakan. Maka aktivitas tidak akan terbatas pada proses negosiasi antar pemerintah, tetapi aktivitas-aktivitas pendukung yang dilakukan oleh pemerintah dan kelompok bisnis selama proses negosiasi IA-CEPA terjadi.

1. Aktivitas Diplomasi Komersial Indonesia terhadap Australia dalam Konteks *Intelligence*

Untuk aktivitas diplomasi komersial dalam konteks *intelligence* sendiri, peneliti berhasil mengidentifikasi seluruh aktivitas tersebut dalam diplomasi komersial yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Australia yang mana aktivitas ini banyak terpusat dalam koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan anggota IA-BPG Indonesia mengingat peranan dan cakupan IA-BPG.

Keunikan pendekatan pemerintah terhadap kelompok bisnis dalam konteks IA-CEPA adalah aktivitas *joint scientific research* yang dilakukan oleh pemerintah kedua negara dan kelompok bisnis kedua negara. Aktivitas ini terpusat pada aktivitas yang dilakukan oleh IA-BPG dan

koordinasi kelompok negosiator dengan kelompok bisnis tersebut. Mekanisme dari *joint scientific research* sendiri adalah sebagai berikut, anggota IA-BPG Indonesia, yaitu KADIN, APINDO dan IABC difasilitasi dengan jasa konsultan untuk membantu riset kelompok bisnis Indonesia yang akan dilaporkan dalam pertemuan IA-BPG. Perusahaan konsultan ini disebut adalah Kiroyan Consultant. Peran dari konsultan ini adalah untuk membantu mengatur pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh anggota IA-BPG Indonesia dan menghubungi asosiasi-asosiasi di setiap sektornya. (Bahar, Peranan IABPG dan Pemerintah Indonesia dalam Menyukkseskan Negosiasi IA-CEPA, 2021) Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh anggota IA-BPG Indonesia tersebut akan dibawa pada rapat rutin yang dilakukan oleh IA-BPG.

Dalam pertemuan rutin tersebut hasil riset yang didapatkan oleh anggota IA-BPG Indonesia dipresentasikan kepada anggota IA-BPG Australia dan juga sebaliknya, sehingga kedua kelompok bisnis dapat memberikan laporan yang bersifat holistik dan mencakup segala permasalahan dan kemungkinan yang diberikan oleh kelompok bisnis sektoral di masing-masing negara. Setelah itu, IA-BPG mempresentasikan hasil temuannya kepada tim negosiator. Laporan kedua IA-BPG dipresentasikan bertepatan sebelum dilaksanakannya negosiasi keempat dari IA-CEPA, atau negosiasi kedua setelah dibukanya kembali negosiasi IA-CEPA di tahun 2016. Presentasi dari laporan ini disaksikan langsung oleh Menteri Perdagangan dari kedua negara, Enggartiasto Lukita dan Steven Ciobo. (Kedutaan Besar Australia, Indonesia, 2016) Apabila dilihat dari topik negosiasi yang dilakukan di negosiasi putaran kelima, topik-topik yang dinegosiasikan pada putaran ini sejalan dengan yang dibicarakan oleh IA-BPG pada laporannya,

seperti contohnya mengenai *e-commerce*. Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa, *joint scientific research* yang dilakukan pada IA-CEPA tidak hanya berpusat pada bagaimana pemerintah membantu untuk memfasilitasi kelompok bisnis Indonesia khususnya dalam melakukan riset, tetapi juga membawa saran dari kelompok bisnis untuk didiskusikan lebih lanjut di meja negosiasi.

Aktivitas bersangkutan dengan *Intelligence* lainnya adalah mengenai *market research*. Selama proses negosiasi IA-CEPA, kegiatan riset market tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia saja. Untuk kepentingan negosiasi, memang pemerintah Indonesia dan Australia telah melakukan *market research* yang mereka tuangkan dalam laporan Joint Feasibility Study, dalam laporan tersebut dapat terlihat bagaimana kapabilitas market Indonesia dan Australia dan kemungkinan yang dapat terjadi dalam memperbaiki hubungan dagang melalui pembuatan perjanjian bilateral di bidang perdagangan yang bersifat komprehensif. Riset dari Joint Feasibility Studies bersifat terbuka yang mana pemerintah dari kedua negara tidak hanya mengajak representatif pemerintah saja, tetapi juga kelompok bisnis dan juga para akademisi baik dari Indonesia maupun Australia. Laporan yang dikeluarkan juga bersifat untuk umum. Joint feasibility Study yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Australia peneliti kelompokan sebagai implementasi aktivitas *Market Research* dan juga *Joint Scientific Research* dalam konteks *Intelligence* karena riset market tidak hanya dilakukan oleh Indonesia saja, tetapi setelah itu riset lebih dalam juga dilakukan oleh kedua negara selama proses *Joint Feasibility Study* di tahun 2007 hingga 2009 ini.

Market research kembali dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya pada saat Australia mengajak untuk membuka

kembali negosiasi IA-CEPA ini ditahun 2015. Namun, untuk riset kali ini hanya bersifat internal saja dan hanya dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Selain itu, dari sisi kelompok bisnis juga melakukan risetnya sendiri, sebagai contoh disini adalah APINDO, mereka tidak hanya mengandalkan data yang mereka dapatkan dari pemerintah, tetapi juga mencoba untuk memperdalam riset sesuai dengan kebutuhan kelompok bisnis Indonesia.

Selain *joint scientific research* dan *market research*, aktivitas lain yang sangat penting bagi permasalahan kelompok bisnis baik Indonesia dan Australia yang sama-sama memiliki kecenderungan tidak percaya terhadap market satu sama lain adalah laporan yang dilakukan oleh diplomat komersial terhadap kelompok bisnis Indonesia. Aktivitas ini dilakukan baik oleh ITPC maupun tim negosiator. Aktivitas yang dilakukan oleh ITPC, Sydney mencakup laporan informasi terbaru mengenai kontak-kontak kelompok bisnis Australia sementara untuk aktivitas yang dilakukan oleh tim negosiator mencakup laporan informasi terhadap kemajuan atau capaian dari setiap putaran negosiasi⁶.

2. Aktivitas Diplomasi Komersial Indonesia terhadap Australia dalam Memperluas Jaringan Aktor yang Terlibat dalam IA-CEPA

Aktivitas penting lainnya dalam diplomasi komersial adalah aktivitas untuk memperluas jaringan aktor-aktor yang terlibat. Salah satu *event* penting yang mewadahi cakupan aktivitas ini adalah Indonesia Australia Business Summit tahun 2019. Indonesia Australia Business

Summit sebelumnya disebut sebagai Indonesia Fair yang mana acara ini pertama kali dilakukan oleh Indonesia pada tahun 2014. Peneliti akan memfokuskan hanya pada Indonesia Australia Business Summit tahun 2019 karena acara ini memang mengangkat tema mengenai IA-CEPA. Dalam acara ini terdapat beberapa aktivitas yang akan dilakukan oleh delegasi dari kedua negara, diantaranya adalah seminar yang dilakukan langsung oleh Pemerintah Indonesia, konsultasi investasi, dan juga *one-on-one meetings* dengan perwakilan-perwakilan Pemerintah Daerah dari Indonesia. (Kementerian Investasi/BKPM, 2019)

Dari beberapa aktivitas tersebut, peneliti mengkategorikan aktivitas *networking* pertama yang terdapat di acara ini adalah mengenai pengembangan kontak dari kelompok bisnis dan pemerintah. Pengembangan kontak dapat terlihat dari latar belakang delegasi acara ini yang tidak hanya berasal dari kelompok bisnis saja, tetapi juga akademisi dan pemerintah daerah.⁷ Perbedaan latar belakang delegasi acara ini telah membuat Indonesia Australia Business Summit menjadi wadah yang tepat untuk para aktor mengembangkan kontak antara delegasi Indonesia khususnya dengan delegasi dari Australia.

Peneliti juga mengidentifikasi adanya aktivitas *match making* yang dilakukan dalam acara ini. *Match Making* ini berbentuk *one-on-one meeting* yang mana IIPC memfasilitasi investor Australia untuk mengadakan pertemuan secara langsung dengan calon *partner* yang membutuhkan suntikan dana investasi dari para investor. Bahkan, kepala IIPC Sydney secara langsung mengajak para investor

⁶ Informasi ini peneliti dapatkan dari wawancara yang dilakukan dengan salah satu anggota IA-BPG Indonesia, yaitu APINDO

⁷ Informasi ini didapatkan dari *press release* yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Indonesia

di Canberra dan Konsulat Jenderal Indonesia di Sydney (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra, Australia, 2019)

Australia untuk bertemu dengan kepala daerah khususnya dari daerah-daerah yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus. Indonesia Australia Business Summit tahun 2019 ini, telah membantu pemerintah daerah Indonesia dalam mempromosikan daerah dan sektor daerahnya yang membutuhkan investasi asing (Kementerian Investasi/BKPM, 2019)

Komoditas atau sektor yang dipromosikan dalam acara ini juga sangat sesuai dengan potensi komoditas yang dapat ditekankan perdagangannya dengan Australia, yaitu otomotif. Daya saing komoditas otomotif Indonesia yang kurang baik di pasar Australia karena tidak diterapkannya tarif 0% telah membuat acara ini menjadi wadah yang sangat tepat dalam mempromosikan dan mendiskusikan salah satu komoditas utama ekspor Indonesia ini.

Dengan profil delegasi yang sangat beragam dan juga aktivitas yang memang mendukung pencapaian tujuan dari diplomasi komersial Indonesia terhadap Australia, peneliti melihat bahwa acara Indonesia Australia Business Summit tahun 2019 ini menjadi aktivitas *networking* yang sangat baik. Hal ini juga didukung dengan output dari Indonesia Australia Business Summit 2019 yang menghasilkan beberapa perjanjian bisnis. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019) Dapat disimpulkan bahwa acara Indonesia Australia Business Summit 2019 mencakup seluruh aktivitas *networking* yang dijelaskan oleh Reuvers dan Ruel, yaitu *Developing business dan government contact, buyer-seller meetings, match making, dan search for partners /distributors/investors*.

Selain acara yang diselenggarakan oleh KBRI Canberra ini, untuk pengembangan kontak dari kelompok bisnis maupun pemerintah juga dilakukan secara rutin oleh IIPC maupun ITPC (Bahar, Peranan IABPG dan Pemerintah Indonesia dalam

Menyukseskan Negosiasi IA-CEPA, 2021). Dari sisi kelompok bisnis juga melakukan risetnya sendiri untuk mengumpulkan kontak dari kelompok bisnis di Australia sehingga kontak yang didapatkan oleh kelompok bisnis Indonesia khususnya tidak hanya terbatas pada yang diberikan pemerintah saja.

Untuk kunjungan delegasi maupun representatif negara dalam konteks negosiasi IA-CEPA di Periode Pertama Joko Widodo memang banyak sekali dilakukan khususnya dalam kunjungan-kunjungan yang membahas mengenai ekonomi, akan tetapi kunjungan lebih banyak dilakukan oleh pihak Australia ke Indonesia.

3. Aktivitas Diplomasi Komersial Indonesia terhadap Australia dalam Konteks *Image campaign*

Dalam konteks *image campaign*, salah satu aktivitas mengenai promosi barang dan jasa melalui pameran perdagangan adalah acara tahunan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Indonesia, yaitu Trade Expo Indonesia. Selain aktivitas promosi perdagangan dan jasa yang dilakukan melalui pameran dari para kelompok bisnis Indonesia untuk mempromosikan produknya, *business matching* juga menjadi salah satu agenda dari Trade Expo Indonesia. Selama masa negosiasi IA-CEPA, Trade Expo Indonesia tahun 2019 menjadi satu-satunya Trade Expo yang memasukan agenda promosi IA-CEPA. Namun sayang, walaupun diadakan promosi mengenai perjanjian ini, Australia tidak masuk kedalam baik dari sisi partisipan maupun negara dengan transaksi terbanyak. Akan tetapi, dari sisi penandatanganan MoU untuk program misi pembelian, Australia masuk ke dalam salah satu dari 25 negara yang dijadwalkan untuk penandatanganan ini. (Suparmanto, 2019)

Peneliti tidak dapat menggali lebih dalam mengenai promosi dari komoditas-

komoditas utama khususnya untuk hubungan dagang dengan Australia dalam acara ini karena banyaknya komoditas dan juga acara ini tidak sebatas acara promosi dagang hanya antara Indonesia dan Australia saja. Namun, apabila dilihat dari sisi kelompok produk yang paling banyak diminati selama acara ini, produk-produk utama Indonesia yang juga merupakan produk utama dari ekspor Indonesia terhadap Australia masuk ke dalam transaksi produk paling banyak, diantaranya adalah kertas dan produk kertas dan juga produk pertanian. (Suparmanto, 2019)

Selain acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan, promosi-promosi untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia terhadap Australia cukup banyak dilakukan pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo. Contohnya adalah kekonsistenan Indonesia dalam berpartisipasi di acara promosi dagang terbesar Australia untuk komoditas teh, kopi, coklat dan susu, yaitu Melbourne International Coffee Expo (MICE). Beberapa *best practice* yang ditemukan dalam acara ini diantaranya adalah berhasilnya promosi kopi gayo yang dapat menarik minat kelompok bisnis Australia yang kurang memiliki informasi dan edukasi mengenai jenis kopi ini.

Selain komoditas kopi, komoditas utama Indonesia lainnya juga cukup aktif dalam berpartisipasi di acara *trade fair*

yang diadakan oleh Pemerintah Australia, diantaranya adalah komoditas makanan dan minuman olahan dalam acara Fine Food Australia. Seperti komoditas kopi pada acara MICE, komoditas ini juga selalu mengikuti acara tahunan yang diadakan oleh Australia ini. Pada tahun 2014, Indonesia yang dikoordinasikan oleh ITPC dan KJRI Victoria mengirimkan 3 perwakilan industri makanan dan minuman di acara Fine Food Australia ini. Perwakilan industri tersebut adalah Dua Kelinci, Garuda Food dan HEAN Corporation. (Buset, 2014) Di tahun selanjutnya, Indonesia menambah perwakilannya menjadi 4, yaitu PT Mayora Indah, CV Intrafood, Eastern Cross Trading dan Saman Estate Coffee. Pada tahun ini Indonesia berhasil menghasilkan transaksi sebesar Rp3 Miliar dari acara Fine Food. Penambahan industri yang mewakili Indonesia di acara terbesar promosi industri makanan dan minuman olahan di Australia ini terus bertambah hingga tahun 2019⁸. Walaupun pada tahun 2019 industri makanan dan minuman olahan yang mewakili Indonesia lebih sedikit di bandingkan tahun sebelumnya, dari sisi transaksi yang terjadi total kenaikan yang terjadi cukup signifikan, mencapai 183% dibandingkan tahun 2018⁹.

Apabila dilihat dari sisi potensi pasar Australia, produk Indonesia menyumbang sebesar 1,58% dari total impor komoditas makanan dan minuman olahan di Australia dan secara keseluruhan Indonesia hanya

⁸ Pada tahun 2017, Paviliun Indonesia diwakili oleh 5 perusahaan eksportir komoditas makanan dan minuman olahan Indonesia dan 3 perusahaan importir komoditas makanan dan minuman olahan Indonesia di Australia. (Monitor, 2017) Di tahun 2018, PT Mayora Indah Tbk, PT Dua Kelinci, PT Sekar laut Tbk, PT Niki Sumber Arta, CV Zoehada Pangan Kreatif, Sony Trading Pty. Ltd, Noval International Trading, dan PT Integral Mulia Cipta menjadi industri yang mewakili Indonesia. (Moneter.Id, 2018) Sedangkan, di

tahun 2019, Indonesia diwakili oleh PT Dua Kelinci, PT Helmigs Prima Sejahtera, PT Sari Segar Husada, PT Garuda Top Plasindo, dan PT Kampung Kearifan Indonesia, Eastern Cross Trading Co., Sony Trading P/L, dan Grein Australia P/L. (Tempo, 2019)

⁹ Di tahun 2017, transaksi produk Indonesia mencapai US\$ 1 juta (Monitor, 2017), di tahun 2018 sebesar US\$ 1,3 juta (Moneter.Id, 2018) dan di tahun 2019 mencapai US\$ 2,38. (Tempo, 2019)

menempati urutan ke 14 negara asal dari impor komoditas ini di Australia. Hal yang disayangkan adalah dibandingkan dengan negara-negara tetangga Indonesia, seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam, Indonesia masih tertinggal jauh untuk komoditas ini. Walaupun memang komoditas ini tidak termasuk ke dalam komoditas ekspor utama Indonesia selama tahun 2014-2019, potensi komoditas ini di pasar Australia cukup besar. Contohnya pada tahun 2017, produk makanan olahan Indonesia Bakmi Mewah mendapat potensial *buyer* yang merupakan importir yang biasa memasok mie instan Indonesia kepada Departemen Keadilan wilayah Victoria untuk digunakan sebagai cemilan bagi para narapidana di sana. Selain itu, nilai transaksi yang selalu naik selama tahun 2014-2019 di acara terbesar komoditas ini di Australia menunjukkan bahwa adanya minat yang tinggi bagi pasar Australia untuk komoditas ini.

Walaupun nilai perdagangan komoditas makanan dan minuman tidak sebesar komoditas kopi, akan tetapi keikutsertaan Indonesia khususnya pada acara tahunan promosi dagang di Australia sangatlah penting. Apabila melihat lagi masalah kelompok bisnis Indonesia dan Australia yang memiliki karakteristik yang kurang percaya terhadap pasar satu sama lain, fasilitas yang diberikan oleh Kedutaan Indonesia di Australia maupun ITPC dalam mendorong keikutsertaan industri-industri Indonesia di acara seperti ini akan membantu kelompok bisnis untuk melihat potensi pasar secara langsung. Hal ini dapat terlihat dari contoh 2 promosi dagang di dua komoditas utama Indonesia ini, contoh mengenai minat pasar Australia pada Kopi Gayo walaupun beberapa *buyer Australia* baru mengetahui jenis kopi ini pada acara MICE menunjukkan bahwa aktivitas promosi seperti ini dapat menjadi salah satu cara atas permasalahan perdagangan dari kelompok bisnis di kedua negara. Selain

itu, tren peningkatan ekspor komoditas makanan dan minuman olahan Indonesia juga dapat dipertahankan khususnya terhadap pasar Australia apabila tarif IA-CEPA didukung dengan promosi perdagangan yang konsisten di komoditas ini.

4. *Best Practice* Koordinasi Pemerintah dan Kelompok Bisnis Indonesia selama Proses Perundingan IA-CEPA

IA-CEPA merupakan perjanjian perdagangan pertama yang menginstitutionalisasi kepentingan kelompok bisnis. Dari analisis yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat bahwa *best practice* dari aktivitas diplomasi komersial Indonesia terhadap Australia berada pada sisi *intelligence* dan juga *networking activity*. Hal ini karena baik melalui *internet research* dan wawancara yang telah dilakukan, koordinasi pemerintah Indonesia dengan kelompok bisnis Indonesia dalam cakupan aktivitas diplomasi komersial tersebut sangatlah intens. Untuk sisi *intelligence* pembentukan IA-BPG sebagai badan adhoc yang membantu tim negosiator dalam mengumpulkan hasil riset maupun masukan baik dalam sisi permasalahan yang dialami oleh kelompok bisnis maupun kesempatan isu yang dapat dibahas selama negosiasi sangatlah tepat, bahkan dalam subab selanjutnya dapat dilihat bahwa banyak sekali saran yang dituangkan oleh kelompok bisnis dalam IA-BPG report yang dijadikan acuan oleh pemerintah kedua negara dan bahkan menjadi *output* dari perjanjian itu sendiri. Bahkan, salah satu saran dari kelompok bisnis mengenai dibentuknya wadah seperti IA-BPG untuk koordinasi pemerintah dan kelompok bisnis setelah negosiasi berlangsung juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Australia. Selain baiknya koordinasi Pemerintah Indonesia dan Kelompok Bisnis Indonesia yang merupakan anggota

IA-BPG, ITPC maupun IIPC Sydney juga sangat intens dalam memberikan laporan maupun informasi kepada kelompok bisnis Indonesia mengenai keadaan market Australia.

Untuk sisi *networking activity* Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Pemerintah Indonesia baik melalui acara yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan maupun ITPC, Sydney, aktivitas *business matching* selalu masuk kedalam agenda promosi perdagangan. Bahkan, dari *internet research* yang peneliti lakukan, untuk ITPC, Sydney sendiri sering kali memberikan jasa bagi potensial eksporter dari Australia maupun Indonesia untuk mengetahui mengenai informasi market Indonesia dan Australia.

Hasil dari Aktivitas Diplomasi Komersial Indonesia terhadap Australia di Era Pemerintahan Joko Widodo (2014 - 2019)

Dalam penjelasan Reuvers dan Ruel hasil dari diplomasi komersial terbagi menjadi dua, yaitu hasil berdasarkan keuntungan ekonomi dan keuntungan politik. Untuk keuntungan dari IA-CEPA sendiri memang belum banyak yang terlihat karena setelah negosiasi IA-CEPA selesai dan diratifikasi oleh kedua negara, pandemi covid-19 muncul dan menjadi hambatan bagi implementasi dari perjanjian ini sehingga menyulitkan peneliti khususnya dalam menganalisis *output* implementasinya. Maka dari itu, untuk hasil dari aktivitas diplomasi komersial terhadap IA-CEPA sendiri, peneliti akan mencoba menganalisisnya berdasarkan *output* akhir dari teks perjanjian IA-CEPA yang disesuaikan dengan aktivitas

dan tujuan dari kelompok bisnis dan pemerintah yang telah dijelaskan disub-bab sebelumnya.

1. Keuntungan Kesempatan dalam Memperkuat Aktivitas Perdagangan Indonesia di Australia di Beberapa Komoditas Utama

Walaupun ekspor Indonesia terhadap Australia lebih tinggi di bidang jasa, ada beberapa komoditas perdagangan barang yang juga menjadi komoditas utama dari perdagangan Indonesia. Diantaranya adalah otomotif, tekstil, karpet/permadani, furnitur dan komoditas lainnya. Untuk komoditas otomotif seperti yang telah dijelaskan pada subab mengenai input bahwa Indonesia dibandingkan negara-negara Asia maupun ASEAN lainnya kurang memiliki nilai daya saing di pasar Australia, permasalahan ini terjadi juga pada perdagangan komoditas otomotif. Malaysia dan Thailand terlebih dahulu mendapatkan tarif preferensi sebesar 0% untuk otomotif. Hal ini telah membuat produk otomotif Indonesia kurang dapat bersaing di pasar Australia.

Kurangnya nilai kompetitif Indonesia di komoditas ini juga terlihat dari naik turunnya nilai ekspor industri otomotif Indonesia ke Australia. Pada awal era Pemerintahan Joko Widodo, tahun 2014, pertumbuhan nilai ekspor komoditas kendaraan roda 4 Indonesia ke Australia sangatlah tinggi dan mencapai angka 69,22% dan suku cadang pertumbuhan negatif diangka 28,02%. Dua komoditas tersebut selalu mengalami pertumbuhan yang fluktuatif sepanjang periode pertama pemerintahan Joko Widodo¹⁰. Padahal

¹⁰ Pada tahun 2015 pertumbuhan untuk nilai ekspor komoditas kendaraan roda 4 dan lebih sebesar ke Australia -80,18% & untuk suku cadang roda 4 dan lebih sebesar 34,63%, Di tahun 2016 pertumbuhan meningkat sangat tinggi untuk komoditas kendaraan roda 4 dan lebih sebesar

968,22% & suku cadang roda 4 dan lebih sebesar -35,40%, di tahun 2017 nilai ekspor komoditas roda 4 maupun suku cadangnya kembali menurun sebesar -91,84% & -9,94%, di tahun 2018 kenaikan nilai ekspor hanya ada di suku cadang roda 4 sebesar 2,64% dan komoditas roda 4 kembali

selama 5 tahun pemerintahan Joko Widodo, komoditas otomotif khususnya untuk ekspor kendaraan roda 4 dan suku cadang roda 4 menjadi komoditas ekspor utama Indonesia dengan kedekatan geografis Indonesia dan Australia beserta keadaan pasar Australia yang memang tidak memiliki industri otomotif lokal, komoditas ini memiliki potensi yang tinggi untuk perdagangan Indonesia dan Australia.

IA-CEPA telah mempermudah hal tersebut dengan penerapan tarif preferensi 0% bagi produk otomotif Indonesia. Selain itu, keuntungan ini juga didukung dengan tidak adanya industri nasional di bidang otomotif yang mana komoditas ini tidak akan memiliki pesaing lokal. Tujuan dari peningkatan nilai kompetitif produk Indonesia di Australia juga karena adanya kebijakan yang hanya diberikan kepada Indonesia, tetapi tidak kepada pesaing komoditas otomotif lainnya, yaitu di komoditas otomotif berjenis kendaraan hybrid dan elektrik. Barang ini akan dikenakan tarif 0% dan akan menguntungkan para pelaku usaha Indonesia di industri ini. (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2018, pp. 5-6)

2. Peningkatan Potensi Investasi di Beberapa Sektor

Hasil akhir dari perundingan IA-CEPA telah menunjukkan bahwa Pemerintah Australia memilih beberapa sektor sebagai sektor yang akan menjadi komitmen investasinya. Sektor-sektor tersebut diantaranya adalah pendidikan kejuruan dan vokasional, pariwisata, konstruksi, pendidikan tinggi, pertambangan, energi, rumah sakit, pengolahan air limbah, transportasi, telekomunikasi, jasa

professional, dan panti jumbo. Penjelasan lebih mendetail mengenai sektor yang mengalami perubahan pengaturan kepemilikan asing (bagi investor Australia) dengan adanya IA-CEPA adalah sebagai berikut beberapa sektor yang mana kepemilikan asing dapat mencapai angka 100% pada sektor hotel dan resort bintang 3 hingga 5, 95% pada sektor pembangkit listrik (>10MW), 75% bagi konstruksi minyak bumi dan gas, kepemilikan asing mencapai 67% pada sektor kesehatan, transportasi (kepemilikan tol, terowongan, jembatan, dan jasa pengelolaan parkir), pengelolaan limbah, jasa professional (arsitektur, tata kota, jasa Teknik dan survey), pelatihan dan Pendidikan vokasi serta pertambangan, kepemilikan asing mencapai 55% pada konstruksi ketenagalistrikan dan terakhir maksimal kepemilikan asing mencapai 51% berada pada sektor pembangkit listrik tenaga pasa bumi (<10MW), operasi jalur kereta api, dan marina. (MARTHINI, 2020)

Dengan melihat sektor yang memiliki potensial untuk ditingkatkan iklim investasinya dengan melihat performa dari FDI Australia di Indonesia selama tahun 2016-2019 dan beberapa sektor utama yang mengalami peningkatan kepemilikan asing, hasil ini akan lebih menekan investasi di sektor-sektor tersebut. Contohnya dapat dilihat dalam penentuan kenaikan kepemilikan asing di sektor konstruksi minyak bumi dan gas, dengan melihat kecenderungan selama 5 tahun terakhir Periode Pertama Pemerintahan Joko Widodo yang mana sektor ini sangatlah diminati oleh investor Australia, peningkatan kepemilikan asing melalui IA-CEPA akan lebih meningkatkan minat investor-investor dalam sektor tersebut. Secara keseluruhan, kebijakan peningkatan

mengalami penurunan sebesar -5,58%, dan ditahun terakhir era Pemerintahan Joko Widodo kedua komoditas ini kembali

menurun untuk roda 4 dan lebih sebesar -84,43% & Suku cadang sebesar -22,65%.

kepemilikan asing untuk investor Australia akan menekan peningkatan penerimaan FDI dan membuat Indonesia menjadi lebih kompetitif lagi khususnya dalam menjadi negara tujuan para investor Australia.

Pemerintah Australia juga menjelaskan bahwa IA-CEPA merupakan komitmen tertinggi Pemerintah Indonesia dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor Australia. Komitmen-komitmen tersebut diantaranya adalah mengenai investasi melalui IA-CEPA dapat memberikan kepastian yang lebih besar bagi para investor Australia khususnya pada sektor energi dan infrastruktur, IA-CEPA juga memperkecil cakupan pemerintah Indonesia khususnya dalam mengatur beberapa regulasi kunci dalam mengatur investasi asing. Peraturan-peraturan investasi lainnya yang diatur IA-CEPA dan akan menguntungkan para investor adalah adanya peraturan mengenai perlakuan diskriminasi terhadap investor. Peraturan ini mengharuskan pembayaran dari kompensasi apabila investasi diambil alih, menjamin para investor dan investasinya mendapatkan standar perlakuan minimum sesuai dengan standar dan hukum internasional. (DFAT, n.d.)

Walaupun Pemerintah Indonesia telah memberikan banyak sekali komitmen dalam membentuk iklim investasi khususnya melalui IA-CEPA, pemerintah Indonesia tetap melindungi industri dalam negeri melalui kontrol dalam kebijakan-kebijakan berikut perpajakan, kepemilikan lahan, perlindungan terhadap UMKM, perikanan tangkap, distribusi energi listrik dan manajemen senior dan jajaran direksi. (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2018, p. 9)

3. Peningkatan Bantuan Australia Aid Pasca Negosiasi IA-CEPA

Keuntungan politik yang dapat terlihat khususnya karena aktivitas diplomasi komersial yang dilakukan selama proses

negosiasi IA-CEPA khususnya di rentang tahun 2014 hingga 2019 adalah dari sisi penerimaan bantuan pembangunan Australia terhadap Indonesia. Bantuan pembangunan dari Australia sendiri sejalan dengan target pembangunan Indonesia yang dituangkan pada RPJMN. Pada tahun 2014, terjadi perubahan bentuk bantuan dari Australia terhadap Indonesia. Perubahan program bantuan ini berubah dari awalnya hanya sebatas penyedia layanan berdasarkan hubungan pemberi bantuan dan penerima bantuan menjadi program untuk membentuk kerjasama ekonomi baru yang mana bantuan ini akan menjadi katalis bagi upaya Indonesia dalam meningkatkan infrastruktur, *economic governance*, perkembangan SDM dan kebijakan sosial. (DFAT, 2015, pp. 3-4)

Fokus dari program bantuan Australia terhadap Indonesia per tahun 2014 hingga 2019 didasari oleh hambatan-hambatan pertumbuhan Indonesia khususnya dalam pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur, defisit skill dan kelemahan institusional. Permasalahan tersebut dan target RPJMN Indonesia membentuk objektif bantuan pembangunan Australia pada periode 2014-2019, yaitu efektif institusi ekonomi dan infrastruktur, perkembangan SDM untuk mencapai produktivitas dan masyarakat yang sehat, serta masyarakat inklusif melalui pemerintahan yang efektif. Pada periode ini juga program-program mengenai ekonomi meningkat sebesar 2x lipat yang mana proporsinya dititikberatkan pada program pembangunan infrastruktur dan perkembangan infrastruktur bank. Selain itu, pengembangan kapasitas SDM pun dititikberatkan pada program-program untuk membantu meningkatkan kapasitas perempuan dalam aktivitas politik dan ekonomi. Walaupun dalam rentang 2014 hingga 2019 jumlah dari bantuan Australia terhadap Indonesia cukup fluktuatif, tetapi selama rentang waktu ini Australia selalu termasuk dalam 5 negara dengan pendonor

pembangunan terbesar di Indonesia dan 3 besar negara pemberi hibah terbesar bagi Indonesia.

Fokus bantuan pembangunan Australia terhadap Indonesia dalam bidang ekonomi pun semakin tinggi dengan selesainya negosiasi IA-CEPA, hal ini terlihat dari komitmen Australia di periode selanjutnya 2019/2020 yang memfokuskan bantuan pembangunannya dalam membantu pemulihan ekonomi Indonesia selama pandemi.

4. Kesempatan untuk Meningkatkan Kapasitas SDM Indonesia

Reuvers menjelaskan bahwa salah satu keuntungan dari aktivitas diplomasi komersial adalah peningkatan lapangan kerja, walaupun dampak dari peningkatan lapangan kerja ini belum terlihat, kedua negara sudah mempersiapkan kerjasama untuk menghadapi penyesuaian peningkatan lapangan kerja melalui *output skill* yang meliputi segala program untuk meningkatkan SDM Indonesia. Output tersebut diantaranya adalah peningkatan kapasitas SDM Indonesia adalah Technical and Vocational Education and Training (TVET), *workplace-based training* atau pemagangan dan *skill-development exchange*.

KESIMPULAN

Permasalahan di tingkat kelompok bisnis yang cenderung tidak mempercayai market satu sama lain telah menjadi hambatan yang cukup besar bagi perdagangan Indonesia dan Australia. Diplomasi komersial yang dilakukan Indonesia untuk memfasilitasi kelompok bisnis dalam meningkatkan aktivitas komersialnya khususnya dalam menjembatani tujuan kelompok bisnis dan negara dalam negosiasi serta pengikutsertaan kelompok bisnis dalam aktivitas *intelligence*, *image campaign* dan *networking activity* menghasilkan peluang sendiri dalam mendorong aktivitas komersial

antara Indonesia dan Australia dan menciptakan solusi bagi permasalahan market tersebut. Tentunya penguatan aktivitas komersial ini merupakan langkah pertama bagi kedua negara untuk mencapai tujuannya, yaitu menjadi *economic power house* di Asia Pasifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. R. (2018). *Faktor yang Mendorong Australia dalam Negosiasi Pembentukan (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) IA-CEPA Tahun 2010*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Amalia, R. M., Ampera, T., & Risagarniwa, Y. Y. (2019). POSITIVE REACTION TOWARD TRADE AND ECONOMIC PARTNERSHIP BETWEEN INDONESIA AND AUSTRALIA GOVERNMENTS IN THE JAKARTA POST. *Intermestic: Journal of International Studies*, 10-27.
- Andriani, Y., & Andre. (2017). Implikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia. *Andalas Journal of International Studies*, 79-92.
- ASEAN. (n.d.). *Joint Declaration of the Leaders at the ASEAN-Australia and New Zealand Commemorative Summit - ASEAN: ONE VISION ONE IDENTITY ONE COMMUNITY*. Retrieved from Association of Southeast Asian Nations: https://asean.org/?static_post=joint-declaration-of-the-leaders-at-the-asean-australia-and-new-zealand-commemorative-summit-2
- ASSYAURI, M. R. (2019). *DIPLOMASI PERDAGANGAN INDONESIA-AUSTRALIA: STUDI KASUS NEGOSIASI COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IA-CEPA)* (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019) (pp. 1-74). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Retrieved 2020, from <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18433/15323111.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Australia Government: Department of Foreign Affairs and Trade . (n.d.). *Joint Declaration on Comprehensive Partnership Between Australia and the Republic of Indonesia*.

- Retrieved from Australia Government: Department of Foreign Affairs and Trade : <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/joint-declaration-on-comprehensive-partnership-between-australia-and-the-republic-of-indonesia>
- Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade. (n.d.). *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*. Retrieved from Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade: <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/Pages/indonesia-australia-comprehensive-economic-partnership-agreement>
- Bahar, W. (2021, April 16). Peranan IABPG dan Pemerintah Indonesia dalam Menyukseskan Negosiasi IA-CEPA. (A. R. Wulandari, Interviewer)
- Baidawi, A., & Zarkasi, A. (2019). Pemasaran Politik Luar Negeri Sebagai Diplomasi Presiden Jokowi Untuk Menarik Investor Asing. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 50-72.
- Buset. (2014). *Tembus Pasaran Australia Lewat Fine Food*. Retrieved from Buset Online: <https://buset-online.com/tembus-pasaran-australia-lewat-fine-food/>
- Buset. (2019). *Memperkenalkan kopi Indonesia di MICE 2019*. Retrieved from Buset Online: <https://buset-online.com/kopi-indonesia-mice-2019/>
- Campbell, C. (2021, April 9th). *IA-CEPA: Opportunities for Human Capital Development through an Education Powerhouse* [Webinar]. Center for Indonesian Policy Studies. <https://www.youtube.com/watch?v=BcMgG8FrtQo>
- Chrismonita, K. R. (2019). *ANALISIS KEPENTINGAN INDONESIA DALAM MENGAKTIFKAN KEMBALI PERUNDINGAN KERJA SAMA IA-CEPA (INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT) DI TAHUN 2016*. Universitas Pertamina.
- Delanova, M. O. (2017). POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO MELALUI PENGUATAN DIPLOMASI EKONOMI. *Dinamika Global Vol 02 No.02*, 154-172.
- DFAT. (2015). *Aid Program Performance Report 2014-15*. DFAT.
- DFAT. (2019). *Indonesia Aid Program Performance Report 2018-19*. Australia Government: Department of Foreign Affairs and Trade. Retrieved from Australia Government: Department of Foreign Affairs and Trade: <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/indonesia-aid-program-performance-report-2018-19>
- Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. (2018). *Fact Sheet Indonesia-Australia CEPA*. Retrieved from Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional: http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20181015_fact-sheet-indonesia-australia-cepta.pdf
- Fitriani, E. (2018). President Joko Widodo's Foreign Policy: Implications for Indonesia-Australia Relations. In T. Lindsey, & D. McRae, *Strangers Next Door? Indonesia and Australia in the Asian Century* (pp. 31-54). Oxford: Hart Publishing.
- Greoger, C. (2021, April 14th). *IA-CEPA: Building an Economic Powerhouse in Food Value Chains* [Webinar]. Center for Indonesian Policy Studies. <https://www.youtube.com/watch?v=pFHGjtLU-50>
- Haryono, E. (2019). Diplomasi Ekonomi sebagai Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia tahun 2015-2018: Tantangan dan Peluang. *Global Strategis, Th. 13, No. 2*, 49-62.
- IA-BPG. (2012). *Position Paper on Considerations Towards the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*.
- IA-BPG. (2016). *Two Neighbours, Partner in Prosperity : Indonesia-Australia Business Partnership Group Submission towards the IA-CEPA*.
- Ika, A. (2016). *Kopi Indonesia "Laku" Rp 1,5 Miliar di Ekspo Melbourne*. Retrieved from Kompas: <https://money.kompas.com/read/2016/03/28/220000026/Kopi.Indonesia.Laku.Rp.1.5.Miliar.di>
- International Communicafe. (2018). *Indonesia companies strike deals at Melbourne International Coffee Expo*. Retrieved from International Communicafe: <https://www.comunicaffe.com/indonesia->

- companies-strike-deals-at-melbourne-international-coffee-expo/
Jackson, R., & Sørensen, G. G. (2014). *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pedekatan Edisi Kelima*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kedutaan Besar Australia di Indonesia. (2015). *Robb Promosikan Perdagangan dan Investasi di Indonesia*. Retrieved from Kedutaan Besar Australia di Indonesia: https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM15_028.html
- Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia. (2019, Oktober 19). *Kunjungan ke Indonesia untuk Pelantikan Presiden Widodo*. Retrieved from Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia: https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM19_024.html
- Kedutaan Besar Australia, Indonesia. (2016, Agustus 2). *Indonesia-Australia Business Partnership Group Menyampaikan Laporan Kedua*. Retrieved from Kedutaan Besar Australia, Indonesia: https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM16_038.html
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra, Australia. (2019). *INDONESIAN EMBASSY IN CANBERRA STRENGTHENS INDONESIA'S ECONOMIC DIPLOMACY THROUGH BUSINESS MEETINGS IN SYDNEY*. Retrieved from KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI CANBERRA, AUSTRALIA: <https://kemlu.go.id/canberra/en/news/2119/indonesian-embassy-in-canberra-strengthens-indonesias-economic-diplomacy-through-business-meetings-in-sydney>
- Kementerian Investasi/BKPM. (2019). *Indonesia Australia Business Summit (IABS) 2019*. Retrieved from Kementerian Investasi/BKPM: <https://www.investindonesia.go.id/en/calendar-of-events/indonesia-australia-business-summt-iabs-2019>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, September 19). *INDONESIAN EMBASSY IN CANBERRA STRENGTHENS INDONESIA'S ECONOMIC DIPLOMACY THROUGH BUSINESS MEETINGS IN SYDNEY*. Retrieved from Embassy of The Republic of Indonesia in Canberra, Australia: <https://kemlu.go.id/canberra/en/news/2119/indonesian-embassy-in-canberra-strengthens-indonesias-economic-diplomacy-through-business-meetings-in-sydney>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2016). *ANALISIS STRATEGI POSISI RUNDING DALAM MEMPERKUAT KERJASAMA INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IA-CEPA)*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2018). *Fact Sheet IA-CEPA*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, Maret 26). *Landasan, Visi Dan Misi Polugri: Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri*. Retrieved from Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/id/read/20/halaman_list_lainnya/sasaran-strategis-kementerian-luar-negeri
- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, March 25). *Landasan, Visi Dan Misi Polugri: Visi Kementerian Luar Negeri*. Retrieved from Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/id/read/17/halaman_list_lainnya/visi-kementerian-luar-negeri
- Killian, P. E. (2012). Paradigma dan Problematika Diplomasi Ekonomi Indonesia. *Global & Strategis, Th. 6, No. 2*, 170-185.
- KJRI Melbourne. (2016). *Indonesia Raih Penghargaan the Australia International Coffee Awards 2016*. Retrieved from Consulate General of the Republic of Indonesia in Melbourne: <https://www.facebook.com/kjri.melbourne/posts/indonesia-raih-penghargaan-the-australia-international-coffee-awards-2016pt-tana/947188621997028/>
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. Newbury Park: SAGE.
- LAZone. (2017). *Indonesia Jadi Primadona di Pameran Kopi Melbourne*. Retrieved from LAZone: <https://www.lazone.id/entertainment/news/i>

- ndonesia-jadi-primadona-di-pameran-kopi-melbourne
- Lee, D., & Ruel, H. (2012). Introduction: Commercial Diplomacy and International Business: Merging International Business and International Relations. In H. Ruel, *Commercial Diplomacy and International Business: A Conceptual and Empirical Exploration* (pp. xv-xvii). Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
- Margiansyah, D. (2020). REVISITING INDONESIA'S ECONOMIC DIPLOMACY IN THE AGE OF DISRUPTION: TOWARDS DIGITAL ECONOMY AND INNOVATION DIPLOMACY. *Journal of ASEAN Studies*, 15-39.
- MARTHINI, N. M. (2020). *INDONESIA AUSTRALIA CEPA DAN BAGAIMANA CARA MANFAATKANNYA*. Retrieved from IABC Bali: <http://iabcbali.org/IABC/IABCWeb.nsf/954160ad649cfdd9482585c10001e9c3/%24File/IA-CEPA%20Presentation%20to%20IABC%20Bali%20-%20By%20Ibu%20Ni%20Made%20Ayu%20Marthini.pdf?Open>
- Marthini, N., M. (2021, April 14th). *IA-CEPA: Building an Economic Powerhouse in Food Value Chains* [Webinar]. Center for Indonesian Policy Studies. <https://www.youtube.com/watch?v=pFHGjtLU-50>
- Masruroh, H. (2020). Trust Factor: Indonesia's Foreign Policy In Enhancing Indonesia-Australia Cooperation Under President Joko Widodo's Leadership. *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.1. No.2 , 129-138.
- Megananda, S., & Sholeh, B. (2020). HUBUNGAN AUSTRALIA-INDONESIA DI MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY). *Global Insight Journal Vol 05 No 02*, 16-34.
- Moneter.Id. (2018). *Pameran Fine Food Australia 2018: Produk Mamin Indonesia Cetak Transaksi Potensial USD 1,3 Juta*. Retrieved from Moneter. Id: <https://www.moneter.id/57752/pameran-fine-food-australia-2018-produk-mamin-indonesia-cetak-transaksi-potensial-usd-1-3-juta>
- Monitor. (2017). *Produk Makanan dan Minuman Indonesia Raup USD 1 juta Dari Fine Food Australia 2017*. Retrieved from Monitor: <https://monitor.co.id/2017/09/20/produk-makanan-dan-minuman-indonesia-raup-usd-1-juta-dari-fine-food-australia-2017/>
- Naray, O. (2011). Commercial Diplomats in The Context of International Bussiness. In P. A. Bergeijk, M. Okano-Heijmans, & a. J. Melissen, *Economic Diplomacy: Economic and Political Perspectives* (pp. 121-148). Den Haag: Brill | Nijhoff.
- Niami, M. S. (2019). Impact of the Indonesia Australia Free Trade Agreement. *3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom* (pp. 73-75). Surakarta: Atlantis Press.
- Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation. (2017, Februari 22). *President Jokowi to Visit Australia*. Retrieved from Cabinet Secretariat of The Republic of Indonesia: <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-to-visit-australia/>
- Okano-Heijmans, M. (2011). Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies. In P. A. Bergeijk, M. Okano-Heijmans, & J. Melissen, *Economic Diplomacy: Economic and Political Perspectives* (pp. 7-36). Leiden: Brill | Nijhoff.
- Osterley, A. (2013). *Indonesia. The Story of the Nation and its Relationship with Australia*. Paris: Trocadero.
- Pasaribu, D., Murwani, A., & Setiawan, I. (2021). *Foreign Direct Investment in Indonesia's Agriculture*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies.
- Patunru, A., Surlianta, A., & Audrine, P. (2021, February). Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia: Membangun Poros Kekuatan. *Makalah Kebijakan No. 33*, p. 16.
- PPEI Kementerian Perdagangan Indonesia . (n.d.). *Produk Unggulan Indonesia*. Retrieved from Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia: <http://ppei.kemendag.go.id/produk-unggulan-indonesia/>
- Rahayu, M. (2018). *Peningkatan SDM perguruan tinggi yang berkeadilan Gender melalui IA-CEPA*. Retrieved from Research Repository Universitas Islam Negeri

- Maulana Malik Ibrahim:
<http://repository.uin-malang.ac.id/4520/2/4520.pdf>
- Ramandisyah, M. (2018). *KEPENTINGAN AUSTRALIA MENGAKTIFKAN KEMBALI PERUNDINGAN INDONESIA-AUSTRALIA COMPERHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IA-CEPA) TAHUN 2016*. Lampung: Univeristas Lampung.
- Reuvers, S., & Ruel, H. (2012). Research on commercial diplomacy: Review and Implications. In H. Ruel, *COMMERCIAL DIPLOMACY AND INTERNATIONAL BUSINESS: A CONCEPTUAL AND EMPIRICAL EXPLORATION* (pp. 1-26). Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
- Sabaruddin, S. S. (2018). Strengthening Indonesian Commercial and Trade Diplomacy by Designing a Clustering of Indonesian Export Market Destination. *PORTES, Revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacifico*, 87-108.
- Sholihah, M. (2019). *STRATEGI INDONESIA UNTUK MENCAPAI KESEPAKATAN INDONESIA – AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IA-CEPA) TAHUN 2010-2018* (Master's thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019) (pp. 1-118). SURABAYA: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL. Retrieved 2020, from <http://digilib.uinsby.ac.id/38250/>
- Sidabutar, V. T. (2020). Pemanfaatan Surat Keterangan Asal Indonesia dalam Meningkatkan Investasi Berorientasi Ekspor Australia ke Indonesia. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 97-104.
- Suparmanto, A. (2019). *Konferensi Pers Trade Expo Indonesia Ke - 34*. Retrieved from Trade Expo Indonesia: http://www.tradexpoindonesia.com/press_release/2019/press_release_Tei2019_25Okt ober2019.pdf
- Susanto, D. A. (2019). Isu Standar Pada Perdagangan Indonesia-Australia Dalam Kerja Sama IACEPA. *Buletin Ilmiah Litbang Perdangan Vol 13 No 1*, 21-46.
- Tempo. (2019). *Indonesia Bukukan US\$ 2,38 Juta di Fine Food Australia 2019*. Retrieved from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1252213/indonesia-bukukan-us-238-juta-di-fine-food-australia-2019>
- Tobing, M. (2015). *Aroma kopi nusantara menyihir Australia*. Retrieved from Kontan: <https://industri.kontan.co.id/news/aroma-kopi-nusantara-menyihir-australia>
- Toledo, H. (2017). The IA-CEPA and sector adjustments: A specific-factors model of production. *International Review of Economics & Finance*, 201-211.
- Warta Ekonomi. (2018). *Kopi-Kopi Indonesia Petik Juara di Ajang MICE Melbourne*. Retrieved from Warta Ekonomi: <https://www.wartaekonomi.co.id/read175331/kopi-kopi-indonesia-petik-juara-di-ajang-mice-melbourne>
- Watson, A. (2013). *Diplomacy: The Dialogue Between States*. London: Routledge.
- Wilson, D. J. (2016). *The changing architecture of the Asia-Pacific trading system: Implications for the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*. Crawley: Perth USAsia Center.
- World Bank. (n.d.). *GDP (current US\$) - Indonesia*. Retrieved from The World Bank: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=ID>
- Zakharia, J. (2021, April 19). Wawancara dengan Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan. (A. R. Wulandari, Interviewer)

BIOGRAFI

Alvira Rizki Wulandari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran

Dadan Suryadipura Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran